



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**RINGKASAN EKSEKUTIF
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025-2045**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI NTT
TAHUN PENYUSUNAN 2024**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendahuluan

Dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTT Tahun 2005-2025, maka sesuai dengan amanat Permendagri 86 Tahun 2017, penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir dan Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN serta adanya kebijakan nasional seperti Implikasi dari pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 mengharuskan disusunnya dokumen RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 serta wajib untuk didampingi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Penyusunan KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045. Dokumen KLHS ini disusun sebelum draf Ranperda RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 dengan demikian KLHS ini bersifat ex-ante. KLHS ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun meliputi 4 (empat) tahapan utama yaitu: (1) Pembentukan tim pembuat KLHS RPJPD, (2) pengkajian pembangunan berkelanjutan, (3) perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, dan (4) penjaminan kualitas, pendokumentasian, validasi.

Kondisi Umum Provinsi NTT

Kondisi Lingkungan Hidup

1. Ekoregion

- a. Dominasi karakteristik ekoregion NTT adalah Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi padang rumput pamah monsun mencakup area 499.887,84 ha (10,76%);

- b. Karakteristik ekoregion dominan NTT memiliki jasa ekosistem sebagai jasa ekosistem penyedia air, jasa ekosistem budaya rekreasi dan ecotourism, jasa ekosistem pengaturan iklim serta jasa ekosistem pendukung pembentuk lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan.

2. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

- a. Daya dukung pangan jika dilihat dari kemampuan daya dukung lahan pertanian yang merupakan ukuran kemampuan produksi tanaman pangan/ padi dan atau tanaman pangan yang lain dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah. menggunakan Carrying Capacity Ratio (CCR) menunjukkan Sebagian besar wilayah di Provinsi NTT kecuali Kota Kupang sampai dengan Tahun 2045 masih mampu untuk swasembada pangan sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduknya, namun demikian rata-rata nilai Indeks Kecukupan Pangan per kabupaten/kota di NTT dan indikator pembentuknya masih jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, seperti angka prevalensi stunting, pengeluaran pangan, persentase masyarakat tanpa air bersih, dan lain-lain;
- b. Secara keseluruhan, mayoritas area di Provinsi NTT masih memiliki kapasitas dan daya tampung air yang belum terlampaui, mencakup sekitar 68,91% dari total luas wilayah, yaitu sebesar 3.200.914,46 Ha. Kota Kupang menjadi wilayah dengan proporsi terbesar dari luas wilayah yang sudah terlampaui, mencapai 89,34%, atau setara dengan 13.548,83 Ha. Selain Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Sabu Raijua juga memiliki proporsi luas wilayah yang terlampaui cukup signifikan, masing-masing mencapai 52,20%, 53,50%, 57,17% dan 80,981%. Kabupaten-kabupaten ini perlu perhatian khusus dalam upaya pencegahan krisis dan kelangkaan air.

3. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan

- a. Pertambahan penduduk akan memberikan tekanan terhadap jumlah timbulan sampah. Proyeksi timbulan sampah pada tahun 2045 meningkat menjadi 6.210.117.161 liter/tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, hal ini menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan jumlah sampah tertangani dimana

terget pengelolaan sampah dalam RPJPN adalah sebesar sebesar 90% dan 35% di antaranya terdaur ulang di tahun 2045. Pengelolaan sampah perkotaan masih menghadapi banyak tantangan antara lain : (1) rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah; (2) kurangnya armada pengangkutan sampah dan adanya tantangan aksesibilitas yang menghambat proses pengangkutan sampah; (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih dioperasikan dengan sistem open dumping, sedangkan desain dari sistem TPA yang disiapkan adalah sistem sanitary landfill; dan (4) komitmen pemerintah daerah masih harus terus ditingkatkan dalam pengelolaan sampah di daerah, khususnya terkait pembiayaan infrastruktur persampahan untuk operasional dan pemeliharaan (Bappenas, 2019);

- b. Nilai IKLH Provinsi NTT dalam 8 tahun terakhir tergolong baik dan masih di atas rata-rata nasional, peringkat 17 dari 34 provinsi di tahun 2022 (nilai IKLH nasional tahun 2022 : 69,22). Penurunan nilai IKLH tahun 2022 terutama dipengaruhi oleh penurunan nilai IKA mencapai -5,66 poin. Selain IKA, terdapat penurunan nilai IKTL dan IKAL. Salah satu faktor penurunan nilai IKAL yaitu pencemaran di kawasan pesisir akibat aktivitas penangkapan ikan yang semakin masif (kebocoran minyak), serta pembuangan limbah domestik dan industri. Sedangkan penurunan IKTL diakibatkan oleh adanya alih fungsi lahan baik tutupan lahan hutan maupun vegetasi non hutan;
- c. Seluas 854.228,87 Ha lahan di NTT berpotensi menjadi kritis. Terdapat beberapa kabupaten dengan luasan lahan kritis dan lahan sangat kritis yang cukup signifikan, seperti Kabuapten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten TTS. sehingga perlu upaya konservasi lahan potensial kritis untuk menghindari dampak penurunan fungsi konservasi, fungsi produksi, dan kehidupan sosial ekonomi Masyarakat;
- d. Berdasarkan pada data Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023, mennjukkan bahwa paparan risiko bencana di Provinsi NTT yang dirinci menjadi keterpaparan sosial, fisik, ekonomi dan Kerusakan lingkungan berada pada kategori sedang dan tinggi terhadap 11 jenis bencana (gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir, tanah

longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, banjir bandang dan likuefaksi).

4. Kinerja Layanan Jasa Ekosistem

Keseluruhan Jasa Lingkungan Hidup berdasarkan DDDT Provinsi NTT menunjukkan dominasi Kelas sedang dan rendah :

- a. Jasa ekosistem penyediaan pangan berada pada dominasi kelas sedang Seluas 2.525.167 Ha;
- b. Jasa ekosistem penyedia air berada pada dominasi kelas sedang Seluas 2.636.056,80 Ha;
- c. Jasa ekosistem Pengaturan Tata Aliran air dan Banjir berada pada dominasi kelas tinggi seluas 1.775.280,47 Ha dan sedang seluas 1.655.058,64 Ha;
- d. Jasa ekosistem Pengatur Iklim berada pada dominasi kelas sedang seluas 2.798.668,45 Ha;
- e. Jasa ekosistem budaya tempat tinggal & ruang hidup berada pada dominasi kelas rendah seluas 2.264.172,53 Ha;
- f. Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan ecotourism berada pada dominasi kelas Dominasi kelas sedang seluas 3.983.639,29 Ha.

5. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

- a. Pertumbuhan ekonomi wilayah di NTT selama tahun 2017-2022 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dilihat dari kontribusi dan pertumbuhan sektor yang tinggi serta besarnya produksi yang dihasilkan. Berdasarkan telaah produksi beberapa komoditas di NTT, diperoleh bahwa komoditas utama dengan produksi dan area pengembangan yang cukup besar di NTT mencakup jagung, sapi, ikan, kopi, kakao dan kelapa. Selain itu, terdapat pula beberapa komoditas yang potensial seperti bambu dan rumput laut;
- b. Dengan memperhatikan isu lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi SDA, seperti perubahan iklim, tekanan penduduk, dan isu-isu pada tingkat nasional dan global lainnya, maka perlu diantisipasi bagaimana kebutuhan pertumbuhan ekonomi kedepannya di NTT dapat berjalan sesuai dengan daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup di NTT sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim Ringkasan kondisi karakteristik wilayah Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

- a. Hasil proyeksi simulasi kenaikan suhu menunjukkan beberapa daerah pesisir yang akan paling terdampak, terutama pada Pulau Sabu dan Pulau Rote. Dengan karakteristik provinsi kepulauan, perlu diantisipasi bagaimana meningkatkan tingkat adaptasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap kerawanan peningkatan suhu permukaan;
- b. Terdapat 38,18% wilayah NTT yang masuk pada kategori rentan terhadap perubahan iklim. Terdapat konsentrasi yang luas di daerah Sumba Barat dan beberapa pulau-pulau kecil yang sepenuhnya masuk ke kategori Tinggi dan perlu diperhatikan, seperti di pulau-pulau kecil di Pulau Sabu, Ende, dan Alor;
- c. Emisi di NTT banyak dikontribusikan dari alih fungsi lahan. Pembukaan hutan lahan kering sekunder menjadi padang rumput/savanna menghasilkan emisi terbesar dengan nilai 38,988,318 ton CO₂ yang diikuti oleh perubahan dari hutan lahan kering sekunder ke semak belukar, pertanian lahan kering campur ke padang rumput hingga konversi pertanian lahan kering campur semak ke pertanian lahan kering;
- d. NTT memiliki risiko bencana hidrometeorologi yang tinggi. Dalam 10 tahun terakhir, NTT mengalami 576 kejadian bencana dengan angin puting beliung menjadi bencana yang paling sering terjadi, diikuti oleh banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Terdapat beberapa daerah yang diidentifikasi lebih rentan pada bencana tertentu.

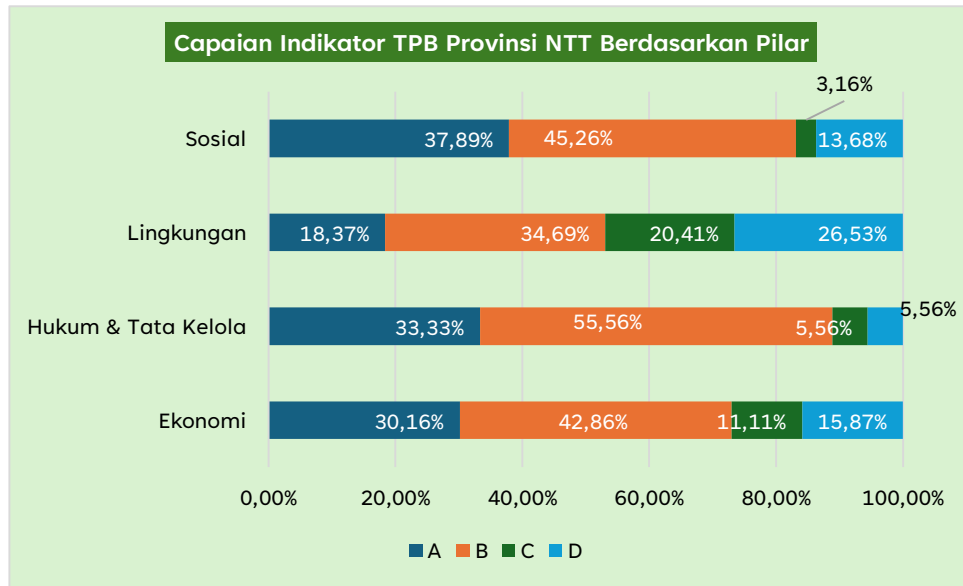
7. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

- a. Selama periode 1990-2020, tren perubahan tutupan lahan di NTT menunjukkan peningkatan lahan pertanian dan permukiman. Pada kelas tutupan hutan terjadi penurunan pada hutan lahan kering sekunder dan hutan mangrove primer;

- b. Kehilangan tutupan hutan yang bersumber dari hutan primer memerlukan perhatian khusus karena kehilangan keanekaragaman hayati dapat lebih tinggi dibandingkan kelas tutupan lahan lainnya;
- c. Dengan meningkatkan kegiatan manusia di wilayah pesisir, maka tekanan terhadap ekosistem pesisir ini juga akan semakin meningkat;
- d. Terdapat kerentanan pada beberapa ekosistem pesisir, yakni ekosistem padang lamun, mangrove, terumbu karang, alur migrasi biota laut dan kawasan konservasi pesisir.

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Dari 235 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, hanya 223 indikator yang dianggap relevan dengan Provinsi NTT. Evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi NTT didasarkan pada hasil pelaksanaan indikator TPB yang melekat pada program dan kegiatan 26 (dua puluh enam) perangkat daerah yang memiliki urusan terkait dengan indikator TPB sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana dalam pelaksanaannya didukung oleh LSM/NGO serta pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data pencapaian indikator TPB di Provinsi NTT dibandingkan dengan target menunjukkan bahwa indikator TPB di Provinsi NTT yang telah dilaksanakan dan mencapai target adalah 31,39% (70 dari total 223 indikator). Bila dilihat kategori pencapaian, proporsi pelaksanaan TPB Provinsi NTT secara umum didominasi oleh kategori B dengan pencapaian 43,50% atau sebanyak 97 indikator, sedangkan untuk kategori C dan D berturut-turut adalah 8,52% dan 16,59%. Komposisi pelaksanaan TPB Provinsi NTT dapat dilihat pada Grafik 1.a dibawah



Gambar 1-a. Prosentase pencapaian indikator di Provinsi NTT
Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Terdapat 70 indikator TPB dengan kategori A. TPB dengan capaian tertinggi adalah TPB 3 yaitu Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia dengan 15 indikator seperti terlihat pada Tabel 4.3. Terdapat 97 indikator yang masuk kategori B, indikator terbanyak pada kategori ini adalah 13 indikator pada TPB TPB 1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun) dan Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (TPB 3). Untuk kategori C indikator terbanyak berada pada TPB 6 (Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan) dengan 5 indikator sedangkan untuk kategori D indikator terbanyak pada TPB 11 (Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan) sebanyak 7 indikator.

Tabel 1. a. Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar Provinsi NTT

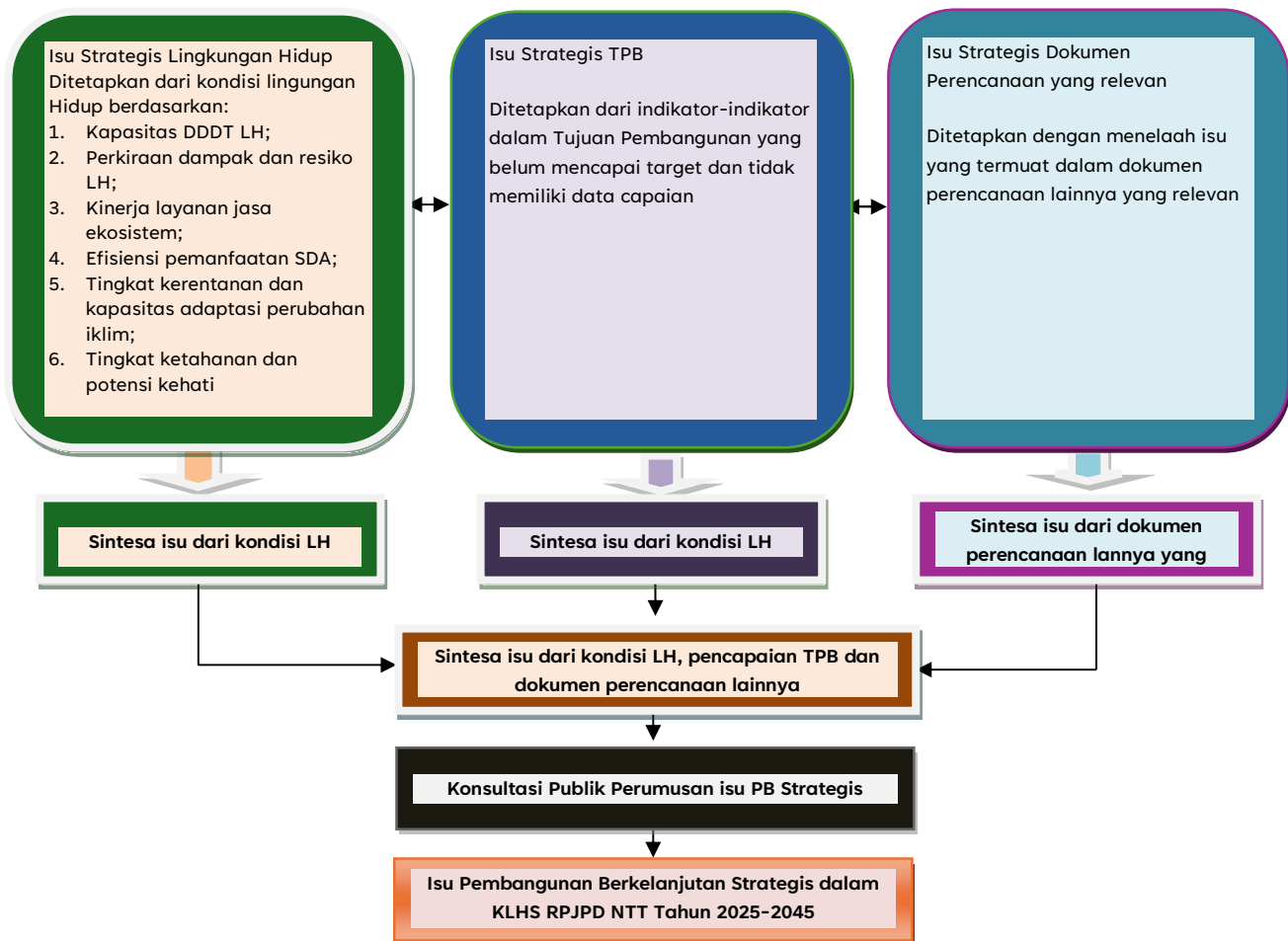
PILAR	JUMLAH INDIKATOR	Kategori Pencapaian							
		A		B		C		D	
		Jumlah	Persentasi	Jumlah	Persentasi	Jumlah	Persentasi	Jumlah	Persentasi
Ekonomi	63	19	30,16%	27	42,86%	7	11,11%	10	15,87%
Hukum & Tata Kelola	18	6	33,33%	10	55,56%	1	5,56%	1	5,56%

Lingkungan	49	9	18,37%	17	34,69%	10	20,41%	13	26,53%
Sosial	93	36	38,71%	43	46,24%	1	1,08%	13	13,98%
TOTAL		70		97		19		37	

Hasil analisis Pokja, 2024

Rumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Pengkajian tujuan pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan kondisi sosial politik, ekonomi, lingkungan hidup, serta hukum dan tata kelola kelembagaan yang terjadi saat ini. Dalam kaitannya dengan pencapaian target TPB, keempat kondisi tersebut merupakan kondisi awal (baseline) dalam mencapai target dari setiap indikator TPB yang menjadi kewenangan Provinsi NTT. Berdasarkan kajian pencapaian TPB di Provinsi NTT, sebanyak 70 indikator TPB (31,39%) di Provinsi NTT telah mencapai target nasional, sedangkan masih terdapat 97 indikator TPB (43,50%) yang belum mencapai target nasional, 19 indikator atau 8,52% belum dilaksanakan belum mencapai target nasional dan 37 indikator TPB atau sebesar 16,59% tidak ada data. Adanya kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dengan target TPB yang harus dicapai, menjadi salah satu dasar untuk perumusan isu prioritas. Selain memperhitungkan gap capaian TPB terhadap target nasional, perumusan isu prioritas juga mempertimbangkan isu dari kondisi muatan lingkungan hidup, isu strategis dari dokumen strategis lainnya, dan isu dari masukan uji publik. Proses pelingkupan isu dilakukan dengan melihat kesamaan substansi dan/atau menelaah sebab akibat. Kerangka analisis untuk menentukan isu prioritas dalam KLHS RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 ditunjukkan pada Gambar dibawah ini :



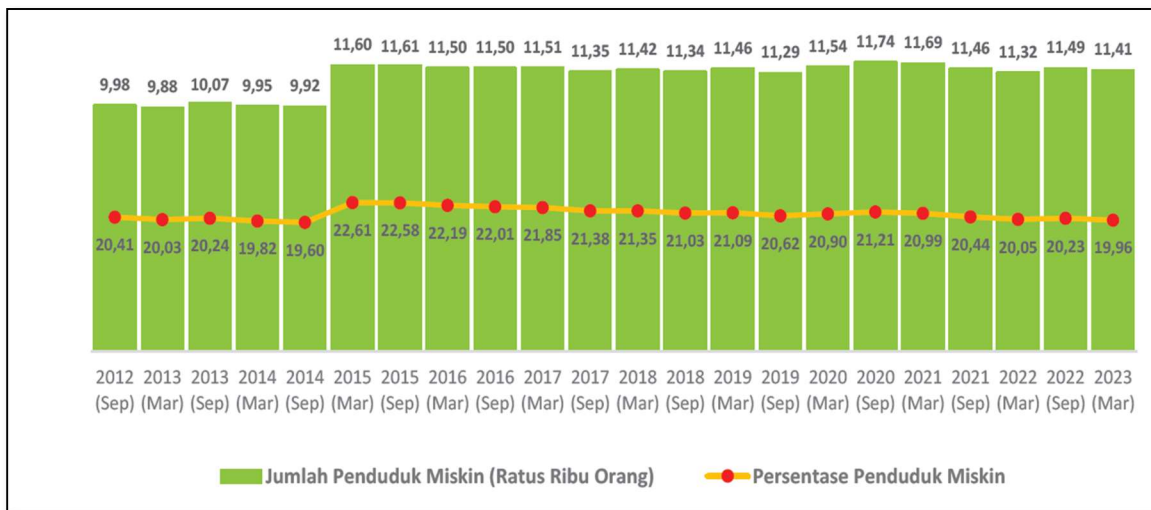
Ketimpangan Sosial Ekonomi

Berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat 13 kabupaten dari 22 kabupaten/kota se-provinsi NTT masuk dalam kategori daerah tertinggal.

Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal berdasarkan 6 (enam) kriteria, yaitu: Perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Indikator perekonomian meliputi persentase penduduk miskin dan pengeluaran per kapita.

Kemiskinan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Secara umum, tingkat

kemiskinan di Provinsi NTT mengalami fluktuasi, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi NTT. Perkembangan tingkat kemiskinan September 2012 sampai dengan Maret 2023 disajikan pada Gambar 5.21.



Grafik 1. b Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentasi Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2023

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 19,96 persen, menurun 0,09 persen poin terhadap Maret 2022. Dan jika dilihat berdasarkan tempat tinggal persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 8,84 persen, naik menjadi 9,12 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 23,86 persen, turun menjadi 23,76 persen pada Maret 2023.

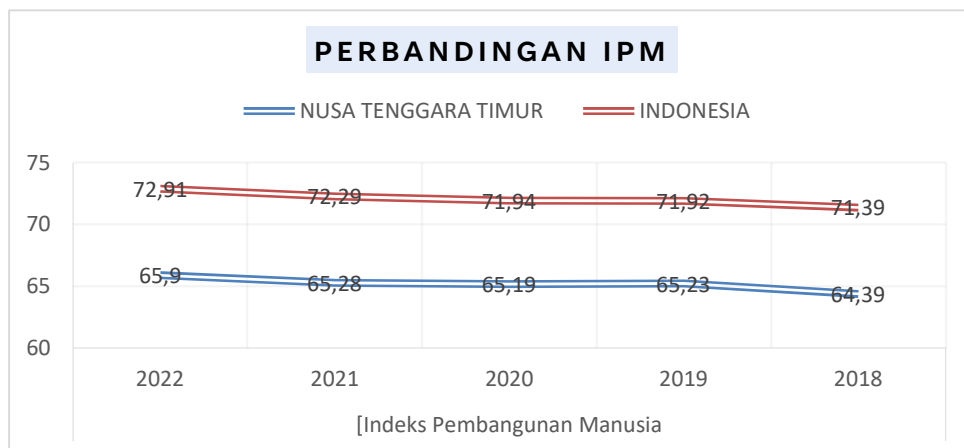
Untuk jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 1,14 juta orang, meningkat 9,5 ribu orang terhadap Maret 2022. Dan dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan meningkat sebanyak 8,8 ribu orang (dari 126,80 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 135,57 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,7 ribu

orang (dari 1.004,83 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 1.005,55 ribu orang pada Maret 2023).

Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp507.203,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp389.518,- (76,80 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp117.685,- (23,20 persen). Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi NTT memiliki 5,90 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.992.498,-/rumah tangga miskin/bulan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan angka IPM di Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022, namun Pada tahun 2020 IPM Nusa Tenggara Timur sempat turun menjadi 65,19 namun pada tahun 2021 IPM Nusa Tenggara Timur kembali naik menjadi 65,28, dan pada tahun 2022 IPM Nusa Tenggara Timur naik menjadi 65,90. Meskipun nilai IPM Nusa Tenggara Timur masih termasuk dalam kategori Sedang ($60 < \text{IPM} < 70$), namun percepatan dan atau pertumbuhan nilai IPM Nusa Tenggara Timur harus menjadi perhatian besar karena berada di 3 (tiga) urutan terbawah IPM seluruh Provinsi di Indonesia, yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih sangat rendah.



Grafik 1. c Grafik Perbandingan IPM Nasional dan Nusa Tenggara Timur

Degradasi Lingkungan Hidup

Alih Fungsi Lahan

Secara historis, perubahan tutupan lahan banyak terjadi di NTT melalui peningkatan luas lahan untuk permukiman dan pertanian dan di sisi lain mengurangi tutupan lahan untuk hutan lahan kering sekunder dan mangrove. Meski masih memungkinkan dilakukan strategi ekspansi untuk pengembangan beberapa sektor tertentu, namun perlu dipastikan bahwa alih fungsi lahan tersebut dilakukan pada lahan-lahan yang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya sesuai. Dengan demikian dapat meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan pembangunan dapat berlangsung secara optimal.

Ke depannya, NTT perlu mengantisipasi beberapa proses yang dapat memberikan tekanan pada alih fungsi lahan, terutama pada lahan-lahan primer dengan tingkat kehati yang tinggi. Hal ini meliputi meningkatnya ancaman perubahan iklim dan tekanan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya kerentanan perubahan iklim di antaranya dapat mengakibatkan peningkatan bencana, perubahan pola tanam, dan meningkatnya kejadian erosi dan sedimentasi. Hal ini diantaranya berpotensi untuk mengganggu pola air, meningkatkan luasan lahan kritis, mengganggu habitat kehati endemik, dan mengubah garis pantai. Sedangkan tekanan pertumbuhan ekonomi daerah kerap kali menggunakan lahan-lahan budidaya dan lindung secara ekspansif dibandingkan intensifikasi pada lahan peruntukkan yang sesuai. Dengan adanya arahan untuk mengembangkan NTT sebagai superhub pariwisata, maka akan membutuhkan dukungan sumber daya alam yang dikelola sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Perlu diantisipasi bahwa alih fungsi lahan pada daerah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kerentanan tersendiri, dengan adanya berbagai ekosistem berbeda di daerah pesisir dan perairan dengan ekosistem yang ada di darat. Hal ini juga akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup, di antaranya peningkatan emisi GRK yang dihasilkan dari terjadinya alih fungsi lahan.

Isu alih fungsi lahan merupakan isu yang penting dan relevan untuk dikemukakan dalam KLHS RPJPD agar dapat menyelaraskan kebutuhan spasial pembangunan wilayah NTT dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Alih fungsi lahan yang terjadi di pesisir juga tidak terlepas dari alih fungsi lahan yang terjadi di daratan sehingga penanganan dan antisipasi ancaman alih fungsi lahan perlu ditangani dalam satu bentang alam yang komprehensif dari hulu ke hilir.

Degradasi SDA dan Lahan Kritis

Air merupakan sumber daya yang sangat penting bagi masyarakat namun keberadaannya semakin kritis. Berkurangnya pasokan air, baik secara kuantitas maupun kualitas yang aman untuk dikonsumsi masyarakat, menjadi persoalan utama di NTT karena merupakan sumber daya yang sangat terbatas namun memiliki peran besar dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat maupun menjaga kestabilan ekosistem. Seiring dengan terjadinya degradasi sumber daya alam, seperti kerusakan di ekosistem pesisir, terjadinya alih fungsi pada lahan hutan lindung, menurunnya kesuburan dan produktivitas tanah dan meningkatnya lahan kritis, isu terkait air di NTT adalah bagian dari persoalan lebih besar mengenai pengelolaan bentang alam secara berkelanjutan.

NTT memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam yang sebetulnya membentuk satu kesatuan bentang alam dari hulu ke hilir, namun perencanaan dan pengelolaannya kerap dilakukan secara terpisah-pisah. Adanya pengelolaan berbasis DAS kemudian menjadi penting untuk melihat beragam sumber daya alam dalam satu bentang alam yang komprehensif. Akan tetapi, rehabilitasi lahan kritis dan DAS masih perlu ditingkatkan karena justru luasan lahan kritis semakin meningkat. Rehabilitasi di daerah hulu yang belum optimal dapat meningkatkan kerentanan pada daerah di hilir, seperti terganggunya ekosistem pesisir karena terjadinya peningkatan sedimentasi.

Pengelolaan sumber daya alam dan lahan kritis berkaitan erat dengan penyelesaian TPB 6 dan 15, yakni tentang akses air bersih dan ekosistem darat.

Adapun isu ini juga berkaitan dengan isu lainnya, seperti isu terjadinya peningkatan alih fungsi lahan, meningkatnya kerentanan terhadap perubahan iklim, dan meningkatnya kerawanan pangan masyarakat.

Perubahan iklim dan bencana

Iklim

Meningkatnya kejadian bencana akan memberikan dampak yang luas dan multigenerasional. Saat ini, NTT dihadapkan pada peningkatan suhu dan perubahan pola hujan. Hal ini memberikan dampak pada masyarakat, di antaranya pada berkurangnya akses air bersih akibat kemarau panjang, berkurangnya produktivitas pertanian masyarakat serta semakin rentannya panen terhadap gangguan hama, dan peningkatan kejadian angin kencang. Meski dampak perubahan iklim banyak terdapat pada sektor-sektor berbasis lahan ini, tapi dampaknya dapat meluas pada sektor lainnya seperti kesehatan masyarakat, pemenuhan pangan, kepastian investasi, dan produktivitas tenaga kerja serta kelangsungan sektor ekonomi unggulan.

Kerentanan terhadap perubahan iklim semakin meningkat di NTT dari adanya peningkatan emisi yang dihasilkan serta masih adanya penduduk yang belum resilien terhadap bencana, baik secara kelengkapan sarana dan prasarana tangguh bencana maupun dari segi kapasitas adaptasi masyarakat secara kolektif. Emisi yang meningkat akibat aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat memperparah intensitas dampak perubahan iklim. Selain itu, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap terjadinya peningkatan bencana, seperti masyarakat yang tinggal pada daerah rawan bencana, masyarakat yang sehari-hari memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kelompok perempuan dan disabilitas, masyarakat adat, dan lain-lain.

Isu kerentanan terhadap perubahan iklim memiliki relevansi yang kuat dengan penyelesaian TPB 13, 14, dan 15 tentang ekosistem darat, ekosistem laut, dan perubahan iklim, maupun relevansi dengan isu-isu kesejahteraan masyarakat, seperti

penanganan stunting dan kerawanan pangan, produktivitas sektor ekonomi dan komoditas unggulan, akses air bersih, permukiman yang berkelanjutan, dan perlindungan kehati.

Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

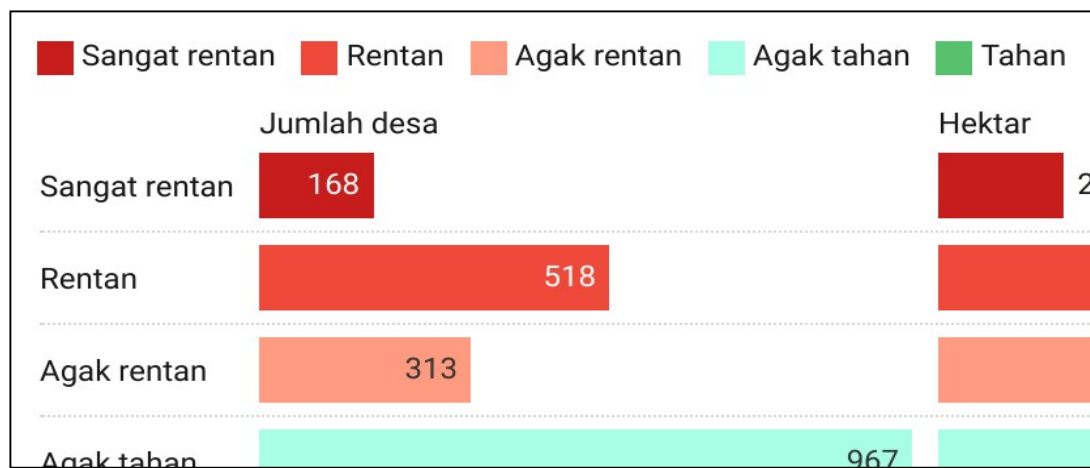
Pada tahun 2022, nilai Indeks Ketahanan Pangan NTT mencapai 68,42, yakni mengalami peningkatan dari nilai IKP pada tahun 2019 senilai 50,69. Meski telah mengalami peningkatan yang baik, rata-rata nilai IKP per kabupaten/kota di NTT dan indikator pembentuknya masih jauh lebih rendah daripada rata-rata nasional. Beberapa komponen pembentuk IKP yang nilainya di NTT masih jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional, meliputi tingginya proporsi masyarakat dengan pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% dari total pengeluaran, tingginya masyarakat yang hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, tingginya proporsi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, rendahnya angka harapan hidup, lama sekolah perempuan, rasio tenaga kesehatan dan tingginya prevalensi stunting.

Tabel 5. 1 Capaian Indikator Pembentuk Indeks Ketahanan Pangan NTT

Indikator Pembentuk IKP	Rata-Rata Nasional	Rata-Rata NTT
Rasio Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Produksi Bersih	1,27	0,73
Kemiskinan (%)	12,27	21,75
Pengeluaran Pangan (%)	25,80	42,49

Indikator Pembentuk IKP	Rata-Rata Nasional	Rata-Rata NTT
Tanpa Listrik (%)	2,65	7,65
Tanpa Air Bersih (%)	30,15	37,59
Lama Sekolah Perempuan (tahun)	8,61	7,79
Rasio Tenaga Kesehatan	4,71	1,89
Angka Harapan Hidup (tahun)	69,66	66,27
Stunting (%)	26,13	35,27
Indeks Ketahanan Pangan	71,84	68,42

Dibutuhkan sinergi lintas sektor dan kerja sama kemitraan antar pemangku kepentingan dalam mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan. Upaya bersama dari berbagai sektor dan pihak terlibat menjadi krusial dalam memperkuat ketahanan pangan, menjaga keseimbangan antara suplai dan permintaan pangan, serta memastikan akses yang merata terhadap sumber daya pangan.



Gambar 5. 1 Indeks Ketahanan Pangan NTT

Isu kerawanan pangan berkaitan erat dengan penyelesaian TPB 1, 2, dan 3 berkaitan dengan kemiskinan, kelaparan dan kesehatan masyarakat. Dengan adanya tekanan perubahan iklim, maka isu kerawanan pangan menjadi semakin penting karena berkaitan erat dengan pola tanam dan ketersediaan bahan pangan di darat dan di laut yang semakin rentan.

Bencana

Provinsi NTT dilewati oleh beberapa patahan sesar sehingga rentan terhadap aktivitas seismik. Kondisi klimatologi wilayah dilalui oleh arus angin dari Asia dan Samudera Pasifik yang telah kehilangan Sebagian besar landungan uap air sehingga curah hujan lebih sedikit dan cenderung kering. Secara historis, Provinsi NTT telah mengalami 576 kejadian bencana dalam 10 tahun terakhir, dengan angin putting beliung menjadi bencana yang paling sering terjadi, diikuti oleh banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

Terdapat beberapa daerah yang diidentifikasi lebih rentan pada bencana tertentu. Kajian kerentanan terhadap risiko karhutla menunjukkan daerah-daerah dengan risiko karhutla tinggi dan sedang seperti Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Malaka, Manggarai, dan Flores Timur. Sedangkan mayoritas area dengan risiko tinggi banjir terpusat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kupang, Malaka, Sumba Timur, dan Ende.

Potensi bencana dan Matriks jumlah paparan risiko bencana di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Resiko Bencana Indonesia Tahun 2023, menunjukkan nilai keterpaparan untuk 11 jenis bencana untuk resiko sosial, fisik, ekonomi dan kerusakan lingkungan berada pada kategorisedang- tinggi

Rekomendasi KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045

Dengan memperhatikan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis serta arahan RPJMN 2025-2045, maka rumusan rekomendasi KLHS RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 adalah :

Visi Daerah

“Nusa Tenggara Timur aman, nyaman, berkeadilan, berdaya saing, inovatif dan berkelanjutan menuju Masyarakat Sejahtera”

Misi Daerah

1. Meningkatkan pelayanan dasar yang berkualitas dan inklusif;

2. Mengembangkan SDM inovatif, produktif dan kompetitif;
3. Mewujudkan ekonomi kreatif berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
4. Pengembangan pariwisata yang Berkelanjutan;
5. Mewujudkan ketahanan pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
6. Mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
7. Mewujudkan ketahanan bencana terpadu menuju masyarakat yang berketahanan melalui kolaborasi pentahelix;
8. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif.

Rekomendasi

Rekomendasi Visi Daerah Dalam KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045

Tabel Rekomendasi Visi Daerah Dalam KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045

No	Isu PB Strategis	Keterkaitan Dengan Sasaran Visi RPJPN Tahun 2025-2045	Tujuan Penataan Ruang Provinsi NTT	Rekomendasi Visi Daerah Dalam KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045	Uraian
1.	Ketimpangan Sosial Ekonomi;	<p>1. Pembangunan ekonomi (pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan ketenagakerjaan);</p> <p>2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan (investasi dan perdagangan luar negeri, industry dan ekonomi kreatif, pariwisata, kemaritiman, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, ketahanan air, ketahanan energy dan komitmen lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon</p> <p>3. Pemerataan pembangunan (pemerataan pendapatan dan</p>	Mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang aman, nyaman, produktif, dan terpadu antar sektor di wilayah daratan dan lautan dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana sebagai pendukung ekonomi nasional serta didukung oleh sektor pariwisata yang maju dan berdaya saing dengan mengedepankan kelestarian wilayah daratan dan lautan melalui pengembangan potensi sumber daya manusia, alam dan budaya lokal yang terpadu, bermitra dan berkelanjutan.	“Nusa Tenggara Timur aman, nyaman, berkeadilan, berdaya saing, inovatif dan berkelanjutan menuju Masyarakat Sejahtera”	<p>1. Aman-Nyaman : Ruang yang aman dan nyaman dan berketahanan</p> <p>2. Berkeadilan : Pembangunan akan dilaksanakan disemua wilayah berdasarkan permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Selain itu pembangunan di Provinsi NTT juga adil bagi semua penduduknya.</p> <p>3. Berdaya saing : NTT dapat berdaya saing sehingga dapat menarik investasi, pariwisata, serta industri kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.</p> <p>4. Inovatif : Setiap masyarakat di</p>

No	Isu PB Strategis	Keterkaitan Dengan Sasaran Visi RPJPN Tahun 2025-2045	Tujuan Penataan Ruang Provinsi NTT	Rekomendasi Visi Daerah Dalam KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045	Uraian
		pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan daerah dan pembangunan dan pemerataan infrastruktur..			Provinsi NTT bisa menciptakan sesuatu yang baru khususnya melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
2.	Degradasi Lingkungan Hidup;	Pembangunan ekonomi berkelanjutan (komitmen lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon).			5. Berkelanjutan : memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan
3.	Perubahan iklim dan bencana;	Pembangunan ekonomi berkelanjutan (komitmen lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon).			
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal	Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan (politik dalam negeri, reformasi birokrasi dan kelembagaan, pembangunan hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, politik luar negeri dan pertahanan keamanan)			

Rekomendasi Misi Daerah Dalam KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045

Tabel Rekomendasi Misi KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045

No	ISU PB Strategis	Alternatif Arah Kebijakan KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045	Rekomendasi Misi Daerah Dalam KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045	Keterkaitan dengan Misi RPJPN Tahun 2025-2045
1.	Ketimpangan Sosial Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan, pemerataan dan optimalisasi infrastruktur pelayanan dasar 2. Pembangunan dan penguatan SDM inovatif, produktif dan kompetitif; 3. Penciptaan lapangan kerja dan SDM yang berkompeten 4. Peningkatan produktivitas dan kualitas untuk percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 5. Penguatan UMKM berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk meningkatkan daya saing global 6. Pengembangan produksi bahan pangan organik dan bahan pangan berbasis sumberdaya lokal; 7. Peningkatan ketersediaan dan kefungsian infrastruktur pasar dan pengolahan hasil. 8. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, aman, merata dan terjangkau; 9. Penguatan sistem perlindungan perempuan serta kesetaraan gender; 10. Pembangunan sistem jaringan dan pembangkit energi melalui pemanfaatan EBT berbasis potensi lokal/daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan dasar yang berkualitas dan inklusif; 2. Mengembangkan SDM inovatif, produktif dan kompetitif; 3. Mewujudkan ekonomi kreatif berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Mewujudkan perlindungan anak dan perempuan 5. Mengembangkan pariwisata yang Berkelanjutan; 6. Mewujudkan ketahanan pangan berbasis potensi sumber daya lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transformasi sosial 2. Transformasi ekonomi 3. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan 4. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah

No	ISU PB Strategis	Alternatif Arah Kebijakan KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045	Rekomendasi Misi Daerah Dalam KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045	Keterkaitan dengan Misi RPJPN Tahun 2025-2045
		11. Pengembangan pariwisata berkelanjutan.		
2.	Degradasi Lingkungan Hidup Perubahan iklim dan bencana	1. Penguatan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2. Pemulihan, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; 3. Penguatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Transformasi Sosial 2. Transformasi Ekonomi 3. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan 4. Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan
3.	Perubahan iklim dan bencana	1. System infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan 2. Meningkatkan manajemen risiko bencana dan iklim yang komprehensif; 3. Penguatan Ketahanan Bencana dan iklim yang Inklusif; 4. iklim; 5. Rehabilitasi lahan terdegradasi pada kawasan hutan	Mewujudkan ketahanan bencana terpadu menuju masyarakat yang berketahanan melalui kolaborasi pentahelix	1. Transformasi sosial; 2. Transformasi ekonomi; 3. Ketahanan sosial budaya dan ekologi 4. Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal	1. Penataan kelenbagaan, regulasi dan digitalisasi; 2. Peningkatan fungsi kelembagaan berbasis teknologi informasi 3. Penguatan kelembagaan yang adaptif	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif	Transformasi tata kelola

Rekomendasi Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah dalam KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045

Tabel Rekomendasi Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah dalam KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045

No	ISU PB Strategis	Rekomendasi Misi	Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045				Sasaran Pokok	Indikator	Pelaksana
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
1.	Ketimpangan Sosial Ekonomi	Meningkatkan pelayanan dasar yang berkualitas dan inklusif;	Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar	Pemerataan dan optimalisasi pelayanan dasar	Optimalisasi pelayanan dasar	Terwujudnya pelayanan dasar yang berkualitas dan inklusif;	1. Terwujudnya pelayanan dasar yang baik; 2. Terwujudnya keluarga yang berkualitas; 3. Terwujudnya perlindungan sosial masyarakat; 4. Terwujudnya ketahanan pangan air dan energi	1. Tingkat kemiskinan 2. Cakupan kepesertaan jaminan social ketenagakerjaan 3. Cakupan kepesertaan SJSN Bidang Kesehatan 4. Akses Rumah Layak Huni 5. Indeks Ketahanan Energi 6. Indeks Ketahanan Air 7. Indeks Kualitas Keluarga 8. Rasio Gini 9. Ibu (per 100rb kelahiran hidup) 10. Insidensi Tuberkulosis per 100rb penduduk 11. Akses layanan terhadap sumber air minum aman berkelanjutan 12. Akses Rumah	Instansi Pemerintah: <ol style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Provinsi NTT Dinas Sosial Provinsi NTT Dinas ESDM Provinsi NTT Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi NTT Dinas Kesehatan, kependudukan dan catatan sipil Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Instansi/Lembaga non Pemerintah :

No	ISU PB Strategis	Rekomendasi Misi	Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045				Sasaran Pokok	Indikator	Pelaksana
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
								tangga terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (%)	1. CV; 2. Bengkel APPEK; 3. Yayasan IPAS; Indonesia; 4. IOM; 5. HIMPSI; 6. Klinik Dewanta; 7. Mental Health Care; 8. Child Fund; 9. Ikatan Bidan Indonesia (IBI); 10. Save The Children; 11. IAP NTT;
		Mengembangkan SDM inovatif, produktif dan kompetitif;	Pemenuhan layanan dasar pendidikan	Pembangunan SDM inovatif, produktif dan kompetitif;	Penguatan SDM inovatif, produktif dan kompetitif;	Terwujudnya SDM NTT yang inovatif, produktif dan kompetitif	Terwujudnya pemerataan pendidikan dan SDM inovatif, produktif dan kompetitif;	1. Indeks Pembangunan Manusia; 2. Pengangguran Terbuka 3. APM SMA/SMK/Sederajat 4. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun 5. Angka kematian	Instansi Pemerintah : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT 2. Dinas sosial Provinsi NTT; 3. Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT; 4. Dinas Koperasi, Tenag Kerja dan Transmigrasi;

No	ISU PB Strategis	Rekomendasi Misi	Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045				Sasaran Pokok	Indikator	Pelaksana
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
									Instansi/Lembaga non Pemerintah : 1. Bengkel APPEK; 2. Child Fund; 3. Save The Children.
		Mewujudkan ekonomi kreatif berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Penciptaan lapangan kerja dan SDM yang berkompeten	Peningkatan produktivitas dan kualitas untuk percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Penguatan UMKM berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk meningkatkan daya saing global	Terwujudnya ekonomi kreatif berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	1. Terwujudnya produktivitas ekonomi daerah; 2. Terwujudnya ekonomi hijau dan ekonomi biru	1. PDRB/Kapita 2. Angka Kemiskinan 3. Tingkat Pengangguran Terbuka 4. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah 5. Indeks Gini 6. Indeks Ekonomi Hijau 7. Porsi EBT dalam bauran Energi Primer	Instansi Pemerintah : 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT; 2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT; 3. Bappelitbangda Provinsi NTT; 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT; 5. Dinas ESDM Provinsi NTT. Instansi/Lembaga non Pemerintah : 1. ICRAF Indonesia; 2. Save The Children;

No	ISU PB Strategis	Rekomendasi Misi	Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045				Sasaran Pokok	Indikator	Pelaksana
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
		Mewujudkan pengembangan pariwisata berkelanjutan	Penyediaan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan untuk mendukung pariwisata	Penegmbangan destinasi wisata melalui Kerjasama <i>pentaholix</i>	Penguatan promosi daya Tarik melalui pemanfaatan teknologi	Terwujudnya NTT sebagai tujuan destinasi wisata	1. Terwujudnya produktivitas ekonomi daerah; 2. Terwujudnya NTT sebagai tujuan destinasi wisata	1. Jumlah Wisatawan 2. Proporsi sektor pariwisata terhadap PDRB	Instansi Pemerintah : 1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kraetif Provinsi NTT; 2. Bappelitbangda Provinsi NTT. Instansi/Lembaga non Pemerintah : 1. Himpunan Pramuwisata Indonesia; 2. Association of The Tours and Travel Agencies (ASITA) NTT; 3. IAP NTT; 4. PT. Angkasa Pura I
		Mewujudkan ketahanan pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Pengembangan produksi bahan pangan organik dan bahan pangan berbasis sumberdaya lokal;	Peningkatan ketersediaan dan kefungsian infrastruktur pasar dan pengolahan hasil.	Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, aman, merata dan terjangkau	Terwujudnya NTT berketahanan pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Terpenuhinya kecukupan pangan	1. Indeks ketahanan pangan; 2. Angka Kemiskinan Tingkat 3. Pravelensi stunting pada balita 4. Pravelensi ketidakcukupan pangan	Instansi Pemerintah : 1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT; 2. Dinas Sosial Provinsi NTT; 3. Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan

No	ISU PB Strategis	Rekomendasi Misi	Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045				Sasaran Pokok	Indikator	Pelaksana
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
									<p>Sipil Provinsi NTT.</p> <p>Instansi/Lembaga non Pemerintah :</p> <p>1. ICRAF Indonesia; 2. PIKUL;</p>
		Mewujudkan perlindungan anak dan perempuan	Penguatan sistem perlindungan anak dan Perempuan	Peningkatan kualitas perempuan dan anak	Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga	Terwujudnya perlindungan anak dan perempuan	Terwujudnya perlindungan anak dan perempuan serta keluarga bahagia	<p>1. Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan</p> <p>2. Indeks ketimpangan gender</p> <p>3. Indeks kesejahteraan anak;</p> <p>4. Indeks Perlindungan Anak</p> <p>5. Indeks kualitas keluarga</p>	<p>Instansi Pemerintah :</p> <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Instansi/lembaga non pemerintah :</p> <p>1. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia NTT;</p> <p>2. CV;</p> <p>3. Bengkel APPEK;</p> <p>4. Siap Siaga;</p> <p>5. ICRAF Indonesia;</p> <p>6. Yayasan Jatica Oxitosin;</p> <p>7. LBH APIK;</p> <p>8. Rumah Harapan GMIT;</p> <p>9. Yayasan Kerti Praja (YKP);</p> <p>12. IOM</p> <p>13. HIMPSI</p>

No	ISU PB Strategis	Rekomendasi Misi	Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045				Sasaran Pokok	Indikator	Pelaksana
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
									14. Klinik Dewanta Mental Health Care 15. Child Fund; 16. Yayasan Ume Daye Nusantara; 17. PIKUL;
2.	Degradasi Lingkungan Hidup	Mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan : (1) penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah, (2) penguatan sistem perizinan, pengawasan,	Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan: (1) penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan, (2) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastic, dan (4) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis secara terpadu	Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) restorasi dan pemulihan lahan terbakar, (2) pemulihan kerusakan ekosistem dan lingkungan pesisir dan laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu	Terwujudnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penguatan kelembagaan , Penanggulan gan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sertapemulih an lingkungan hidup	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Indeks Risiko Bencana 3. Penurunan Intensitas Emisi GRK 4. Daur ulang sampah (%) 5. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (penanganan sampah 6. Indeks pengelolaan kehati 7. Akses layanan terhadap sumber air minum aman dan berkelanjutan (%) 8. Proporsi Luas lahan kritis yang	Instansi Pemerintah : 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT; 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT; 3. Bappelitbangda Provinsi NTT; 4. Dinas PUPR Provinsi NTT Instansi/lembaga non pemerintah : 1. ICRAF Indonesia; 2. Koalisi Kopi (Kelompok Orang Muda Peduli Iklim); 3. WWF; 4. IAP;

No	ISU PB Strategis	Rekomendasi Misi	Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045				Sasaran Pokok	Indikator	Pelaksana
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
			<p>dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan (3) penguatan mekanisme pidana, perdata dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup</p> <p>2. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) pemantauan kualitas udara, air</p>		<p>karang, dan padang lamun, (4) pemulihan habitat spesies terancam punah, dan (5) peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar (TSL) terancam punah</p>			<p>direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan</p>	

No	ISU PB Strategis	Rekomendasi Misi	Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045				Sasaran Pokok	Indikator	Pelaksana
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
			dan air laut, (2) pemantaun kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan, (3) pencegahan kebakaran hutan dan lahan, (4) pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dan pesisir, (5) peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, (6) pencegahan kehilangan keanekaraga man hayati dan						

No	ISU PB Strategis	Rekomendasi Misi	Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045				Sasaran Pokok	Indikator	Pelaksana
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
			kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah, baik di daratan maupun perairan, (7) penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem						
3.	Perubahan iklim dan bencana	Mewujudkan ketahanan bencana terpadu menuju masyarakat yang berketahanan melalui kolaborasi pentahelix	Penguatan rencana pengurangan risiko bencana melalui rencana aksi pengurangan risiko bencana daerah yang akan diintegrasikan dengan rencana aksi adaptasi perubahan iklim	Integrasi kerjasama antar sektor terkait kebijakan berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana	Peningkatan Ketahanan Bencana dan iklim yang Inklusif	Terwujudnya ketahanan bencana terpadu menuju masyarakat yang berketahanan melalui kolaborasi pentahelix melalui penguatan rencana	Terwujudnya ketahanan bencana dan iklim	1. Indeks Risiko Bencana; 2. Indeks Ketahanan Daerah; 3. Penurunan Intensitas Emisi GRK 4. Kerugian ekonomi langsung akibat bencana (%) PDRB	Instansi Pemerintah : 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT; 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT; 3. Bappelitbangda Provinsi NTT; 4. Dinas Sosial Provinsi NTT

No	ISU PB Strategis	Rekomendasi Misi	Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045				Sasaran Pokok	Indikator	Pelaksana
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
						pengurangan resiko bencana, peningkatan kerjasama antar sektor serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim			Instansi/Lembaga Non Pemerintah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bengkel APPEK; 2. Siap Siaga; 3. WFP; 4. Koalisi Kopi (Kelompok Orang Muda Peduli Iklim); 5. Koalisi Adaptasi (Pembawa Angin Dari Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Timor Indonesia); 6. Koalisi Masyarakat Sipil; 7. Save The Children; 8. PIKUL; 9. Taruna Siaga Bencana.
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif	Penataan kelenbagaan, regulasi dan digitalisasi	Peningkatan fungsi kelembagaan berbasis teknologi informasi	Penguatan kelembagaan yang adaptif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks perilaku anti korupsi 2. Indeks Pelayanan Publik 3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4. Persentase 	Instansi Pemerintah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; 2. Inspektorat Provinsi NTT; 3. Dinas Komunikasi dan

No	ISU PB Strategis	Rekomendasi Misi	Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RPJPD NTT Tahun 2025-2045				Sasaran Pokok	Indikator	Pelaksana
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			
								peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 5. Indeks Daya Saing Daerah	Informatika Provinsi NTT; 4. Bappelitbangda Provinsi NTT Instansi/Lembaga Non Pemerintah : USAID ERAT;